

Evaluasi Kebijakan dan Strategi Penurunan Angka Stunting pada Tahun 2024

Evaluation of Policies and Strategies for Reducing Stunting in 2024

Tri Rini Puji Lestari

tri.lestari@dpr.go.id

Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia

Received: Januari 7, 2025 | Revised: Februari 4, 2025 | Published: June 30, 2025

Abstract: This article aims to evaluate the effectiveness of Indonesia's national stunting reduction policy in 2024 and to identify the key factors influencing its achievement. A descriptive-analytical approach was applied using policy analysis and secondary data from relevant government institutions. The findings indicate that the national stunting prevalence decreased to 19.8 percent in 2024, reflecting measurable progress from the previous year. The implementation of the five-pillar national strategy and the holistic, integrative, thematic, and spatial (HITS) approach has significantly contributed to this outcome, particularly through specific interventions such as supplementary feeding programs and public education campaigns. Nevertheless, persistent challenges remain, including limited coordination across sectors, inadequate health personnel, suboptimal use of data, and disparities among regions. Lessons learned from best practices—both domestic and international—emphasize the importance of utilizing real-time data, digitalizing interventions, and fostering multisectoral collaboration. To support sustainable policy outcomes, it is recommended that the Indonesian House of Representatives (DPR RI), especially Commission IX, strengthen budget oversight, promote integrated monitoring systems, and expand community-based education programs rooted in local wisdom to accelerate the 2025 target of 18.8 percent and contribute to achieving the vision of a Golden Indonesia 2045.

Keywords: health; nutrition; policy; program; stunting

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan nasional penurunan stunting pada tahun 2024 dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pencapaiannya. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan telaah kebijakan berbasis dokumen dan data sekunder dari kementerian dan lembaga terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8 persen pada 2024, menandai kemajuan dari tahun sebelumnya. Strategi nasional berbasis lima pilar dan pendekatan holistik, integratif, tematik, and



spasial (HITS) telah memberikan kontribusi signifikan, terutama melalui intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan dan kampanye edukasi. Namun, tantangan masih ditemukan dalam aspek koordinasi lintas sektor, keterbatasan tenaga kesehatan, pemanfaatan data yang belum optimal, serta kesenjangan antardaerah. Pembelajaran dari praktik terbaik, baik di dalam maupun luar negeri, menunjukkan bahwa penggunaan data *real-time*, digitalisasi intervensi, dan kolaborasi multisektor menjadi kunci keberhasilan. Untuk mendukung keberlanjutan kebijakan, direkomendasikan agar DPR RI, khususnya Komisi IX, memperkuat pengawasan anggaran, mendorong integrasi sistem pemantauan, dan memperluas cakupan edukasi masyarakat berbasis kearifan lokal guna mempercepat pencapaian target 18,8 persen pada tahun 2025 dan mewujudkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Kata kunci: gizi; kebijakan; kesehatan; program; *stunting*

Pendahuluan

Tengkes (*stunting*) menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesehatan di Indonesia karena dampaknya yang luas terhadap perkembangan fisik dan kognitif anak. Kondisi ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan yang sangat penting untuk pertumbuhan anak. Jika tidak segera ditangani, *stunting* dapat menyebabkan gangguan kognitif, produktivitas rendah, peningkatan risiko penyakit kronis, dan memperburuk kemiskinan. Anak-anak yang mengalami *stunting* akan tumbuh dewasa dengan kapasitas yang terbatas, yang akan menghalangi kemajuan negara. *Stunting* tidak hanya menghambat perkembangan fisik anak, tetapi juga memengaruhi kemampuan mereka untuk bekerja dengan produktif di masa mendatang. Anak-anak yang mengalami *stunting* biasanya memiliki sistem kekebalan yang lemah, tingkat kecerdasan yang rendah, serta kesulitan dalam proses belajar. Hal ini akan menyebabkan rendahnya produktivitas mereka di masa dewasa, sehingga akan menjadi penghalang bagi pertumbuhan ekonomi negara (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional [BKKBN], 2021a).

Indonesia masih menghadapi prevalensi *stunting* yang tinggi dibandingkan dengan negara lain. Berdasarkan data dari Pantauan Status Gizi (PSG) dan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), prevalensi *stunting* pada bayi di bawah lima tahun (balita) mengalami penurunan signifikan, dari 30,8 persen pada 2018 menjadi 24,4 persen pada 2021, dan 21,5 persen pada 2023 (Kementerian Kesehatan [Kemenkes], 2024; Kementerian Sekretariat Negara [Kemensetneg], 2024; Lestarini *et al.*, 2024). Meski ada kemajuan, angka *stunting* Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia (20,9 persen) dan Thailand (12,3 persen), serta negara maju seperti Singapura (2,8 persen) dan Jepang (5,5 persen) (Supermana, 2023).

Padahal, selama ini, pemerintah Indonesia telah menjalankan berbagai kebijakan untuk menurunkan *stunting*, seperti pemberian makanan tambahan, pemantauan pertumbuhan, serta edukasi gizi bagi ibu hamil dan balita. Selain itu, intervensi gizi juga melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial. Program ini juga didukung dengan perbaikan sanitasi, air bersih, dan pelayanan kesehatan. Namun, masih terdapat tantangan terutama dalam memastikan program ini berhasil di seluruh wilayah Indonesia.

Di sisi lain, masih terdapat disparitas prevalensi *stunting* antara daerah perkotaan dan perdesaan. Hasil penelitian di beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* pada balita di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan

di perkotaan. Di Indonesia, perbedaan karakteristik antara anak-anak di kedua wilayah ini menjadi salah satu penyebab utama disparitas *stunting*. Kesenjangan prevalensi *stunting* ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti proporsi berat badan lahir rendah (BBLR), tingkat pendidikan ibu, tinggi badan ibu, pola konsumsi makanan ringan yang tidak sehat, serta sanitasi yang memadai. Faktor-faktor sosiodemografi tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap perbedaan prevalensi *stunting* antara perdesaan dan perkotaan. Dengan demikian, penyebab disparitas ini mencakup berbagai aspek, termasuk karakteristik demografis, kondisi lingkungan, pendidikan ibu, status ekonomi, serta akses terhadap pelayanan kesehatan (Astari et al., 2023, p. 11).

Kebijakan dan program penurunan *stunting* di Indonesia telah dirancang dengan pendekatan yang komprehensif, berlandaskan pada lima pilar utama yang menjadi inti dari Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*. Kelima pilar ini diintegrasikan dengan harmonis, guna memastikan bahwa upaya mengurangi prevalensi *stunting* dapat berlangsung secara efektif, berkesinambungan, dan sesuai dengan arahan dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Perpres 72/2021). Melalui pendekatan ini, tujuan tidak hanya sebatas mencapai target penurunan *stunting*, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia secara menyeluruh (BKKBN, 2021b).

Harapannya, tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk meneguhkan komitmen nasional dalam mempercepat penurunan *stunting* secara lebih terarah dan merata. Dengan dukungan kebijakan yang makin kuat, sinergi lintas sektor yang lebih solid, serta pemanfaatan data dan teknologi secara optimal, diharapkan upaya penurunan *stunting* tidak hanya berhasil mencapai target prevalensi 18,8 persen, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul. Keberhasilan ini akan menjadi pijakan strategis untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045 yang sehat, cerdas, dan produktif (Kemensetneg, 2025).

Seiring dengan itu, berbagai penelitian telah menganalisis efektivitas kebijakan yang diterapkan. Hasil analisis bibliometrik dan konten terhadap 103 artikel yang diterbitkan dalam jurnal terkait implementasi penanganan *stunting* di Indonesia, menyatakan bahwa intervensi yang paling sering dilakukan adalah intervensi spesifik dan sensitif, seperti pemberian makanan tambahan serta edukasi gizi untuk meningkatkan pola makan yang sehat. Hasil ini menunjukkan pentingnya pendekatan gizi yang lebih mendalam dalam mengatasi masalah *stunting*, dengan fokus pada pemenuhan gizi anak dan ibu (Rahman et al., 2023, pp. 44–59).

Selain itu, hasil penelitian *reviu sistemik* pada 1.232 artikel yang mengidentifikasi pelaksanaan program pencegahan *stunting* di Indonesia, menyatakan bahwa edukasi gizi yang ditujukan kepada ibu balita, ibu hamil, dan calon ibu menjadi salah satu intervensi yang sangat efektif dalam pencegahan *stunting*. Pembentukan kelompok belajar untuk ibu balita juga terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman tentang gizi seimbang dan pentingnya pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif (Fitri J. et al., 2022, p. 281).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pencegahan *stunting* di Indonesia perlu memprioritaskan pendekatan gizi yang terintegrasi dan berbasis komunitas. Edukasi gizi bagi ibu hamil, ibu balita, dan calon ibu harus diperluas guna meningkatkan kesadaran serta praktik pemberian gizi yang tepat. Selain itu, pembentukan kelompok belajar dan penguatan dukungan sosial di tingkat komunitas dapat berfungsi sebagai katalisator untuk memperkuat pemahaman mengenai

pentingnya pola makan sehat, pemberian ASI eksklusif, serta penerapan gizi seimbang. Upaya ini harus didukung oleh kebijakan yang menjamin keberlangsungan intervensi spesifik dan sensitif, sehingga dapat berjalan efektif, terukur, serta menjangkau kelompok sasaran. Pendekatan lintas sektor juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program dan dampak yang optimal.

Agar dapat memahami *stunting* secara lebih mendalam, penting untuk mengidentifikasi akar permasalahannya dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah gizi buruk pada anak. Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program untuk mengatasi *stunting*, tantangan yang dihadapi masih sangat kompleks dan beragam. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dan tindakan nyata yang terencana dari semua pihak. Pendekatan lintas sektor dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta, sangatlah penting untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan mencapai hasil yang diharapkan.

Artikel ini disusun berdasarkan studi pustaka yang mengacu pada berbagai referensi dan studi kasus pelaksanaan program penanganan *stunting* di sejumlah daerah, serta dilengkapi dengan analisis perspektif yang komprehensif. Permasalahan utama yang dikaji dalam tulisan ini mencakup efektivitas kebijakan penurunan *stunting* pada tahun 2024 dan berbagai faktor yang memengaruhi pencapaian target tersebut.

Tujuan artikel ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan penurunan *stunting* tahun 2024 dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pencapaiannya. Selain itu, disampaikan pula rekomendasi untuk memperbaiki mekanisme pemantauan dan mempercepat penurunan *stunting*. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Komisi IX DPR RI dalam perumusan kebijakan nasional agar lebih efektif, khususnya pada awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Rekomendasi yang disampaikan juga dapat menjadi masukan strategis untuk perencanaan tahun 2026, termasuk penguatan sinergi lintas sektor, pengawasan anggaran, dan akselerasi pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta visi Indonesia Emas 2045.

Tinjauan Konseptual *Stunting*

Menurut World Health Organization (WHO), *stunting* adalah gangguan pertumbuhan yang menggambarkan tidak tercapainya potensi pertumbuhan sebagai akibat status kesehatan dan/atau nutrisi yang tidak optimal (*stunted growth reflects a process of failure to reach linear growth potential as a result of suboptimal health and/or nutritional conditions*) (World Health Organization [WHO], 2015). Sementara itu, United Nations Internasional Children's Emergency Fund (Unicef) menyatakan bahwa indikator seorang anak mengalami *stunting* jika *height for age Z score* (HAZ) kurang dari -2 SD menurut *growth reference* yang berlaku (*below minus two standard deviations from median height for age of reference population*). Dengan demikian, definisi menurut Unicef mengartikan bahwa semua anak pendek dapat disebut juga sebagai *stunting* (United Nations Internasional Children's Emergency Fund [Unicef], 2023).

Jika kedua definisi di atas digabungkan, maka *stunting* dapat dipahami sebagai ketidakmampuan untuk mencapai potensi pertumbuhan yang ideal, yang tercermin dengan HAZ kurang dari -2 SD berdasarkan acuan pertumbuhan yang berlaku, akibat dari keadaan kesehatan dan/atau pemenuhan nutrisi yang kurang baik. Oleh karena itu, penting untuk menyatakan faktor penyebab masalah kesehatan dan/atau nutrisi,

karena tidak semua anak yang memiliki tinggi badan rendah (dengan HAZ kurang dari -2 SD) disebabkan oleh masalah kesehatan dan/atau nutrisi, sehingga tidak semua anak dengan tinggi badan rendah dapat dianggap mengalami *stunting* (Prawirohartono, 2021).

Berdasarkan penjelasan dari definisi tersebut di atas, maka panjang badan (PB) atau tinggi badan (TB) menurut usia merupakan indikator pengukuran dalam menentukan *stunting*. Untuk mengetahui apakah seorang anak *stunting*, perlu dilakukan pengukuran panjang badan untuk anak usia di bawah 2 tahun atau tinggi badannya untuk anak usia di atas 2 tahun dengan cara yang benar. Prosedur lain dalam menentukan *stunting* adalah dengan menentukan nilai HAZ, mengklasifikasikan dengan standar pertumbuhan yang berlaku saat ini. Jika anak termasuk pendek, kemudian ditentukan penyebab anak menjadi pendek (nutrisi atau kelainan tertentu). Setelah yakin penyebabnya adalah nutrisi atau penyakit, maka dapat ditentukan bahwa anak tersebut *stunting* atau bukan (Prawirohartono, 2021).

Menurut Neherta *et al.* (2023), *stunting* disebabkan oleh berbagai faktor, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang saling terkait dan berkontribusi. Penyebab langsung *stunting* meliputi kurangnya asupan gizi yang memadai dan infeksi. Asupan gizi yang cukup sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan balita. Ketidacukupan gizi biasanya disebabkan oleh pola makan yang tidak memenuhi kebutuhan pertumbuhan atau adanya ketidakseimbangan antara konsumsi dan kebutuhan zat gizi, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar bayi, seperti praktik pengasuhan yang kurang baik dan tidak aman, mulai dari inisiasi menyusui dini (IMD) hingga pemberian ASI eksklusif serta makanan pendamping ASI (MPASI) hingga usia 24 bulan. Kedua, faktor internal yang berhubungan dengan diri anak atau orang tua, seperti usia dan pengalaman orang tua. Makin matang dan berpengalaman orang tua, makin baik pula kemampuan mereka dalam merawat dan mendukung tumbuh kembang anak. Kondisi fisik anak juga memengaruhi, di mana anak yang berada dalam keadaan rawan bisa meningkatkan kebutuhan zat gizi untuk pertumbuhan fisik yang cepat.

Penyebab langsung lainnya adalah infeksi yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak. Kondisi infeksi dan demam dapat menurunkan nafsu makan, menyulitkan anak untuk menelan, serta mencerna makanan. Balita kekurangan gizi lebih rentan terhadap berbagai infeksi, seperti cacingan, infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), diare, dan infeksi lainnya. Faktor-faktor ini berkaitan erat dengan kualitas pelayanan kesehatan dasar, khususnya imunisasi, kondisi sanitasi, kualitas lingkungan hidup, dan perilaku sehat. Lingkungan dengan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan risiko paparan patogen, yang selanjutnya memicu infeksi berulang dan memperburuk kondisi gizi anak. Oleh karena itu, menjaga daya tahan tubuh anak, memastikan asupan gizi yang memadai, serta meningkatkan kualitas sanitasi dan perilaku hidup bersih sangat penting untuk mencegah *stunting* (Neherta *et al.*, 2023).

Di sisi lain, faktor tidak langsung yang memengaruhi *stunting* mencakup, pertama, ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Ketersediaan pangan untuk konsumsi sangat tergantung pada jumlah anggota keluarga; semakin banyak anggota keluarga, semakin banyak pangan yang perlu disediakan, dan begitu pula sebaliknya. Jika jumlah pangan yang tersedia terbatas, hal ini akan berimplikasi pada status gizi keluarga. Kedua, faktor sosial ekonomi juga berperan penting. Status ekonomi keluarga yang rendah sering kali berkaitan dengan tingkat pendidikan ibu, yang memengaruhi pilihan makanan yang dikonsumsi. Selain itu, pekerjaan ayah juga berpengaruh, karena peng-

hasilan keluarga dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang dimiliki. Jika pendapatan keluarga berada di bawah upah minimum regional (UMR), kemungkinan terjadinya *stunting* akan lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang memiliki pendapatan di atas UMR. Ketiga, tingkat pendidikan memegang peranan penting. Pendidikan yang rendah pada ibu dapat memengaruhi cara pengasuhan dan perawatan anak, yang pada gilirannya berpengaruh pada pemilihan dan penyajian makanan untuk anak (Neherta et al., 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengasuhan yang kurang baik pada balita dapat berdampak negatif terhadap konsumsi pangan dan status gizi mereka, sehingga menghambat tumbuh kembang yang optimal (Putri et al., 2024, p. 83). Ibu dengan pendidikan rendah biasanya lebih sulit menyerap informasi gizi, sehingga tidak mampu menyediakan menu yang tepat untuk balita. Akibatnya, risiko *stunting* pada anak pun meningkat.

Stunting memiliki dampak yang signifikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, anak-anak yang mengalami *stunting* sering kali menghadapi masalah seperti gagal pertumbuhan, hambatan dalam perkembangan kognitif dan motorik, ukuran fisik yang tidak optimal, serta gangguan metabolisme. Di sisi lain, dampak jangka panjang dari *stunting* termasuk rendahnya kapasitas intelektual. Hal ini disebabkan oleh kerusakan permanen pada struktur dan fungsi saraf serta sel-sel otak, yang akhirnya mengurangi kemampuan anak untuk menyerap pelajaran saat mereka bersekolah. Situasi ini akan berdampak pada produktivitas mereka di masa dewasa. Menurut Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) (2018 dalam Najma et al., 2022, pp. 77–78), anak-anak yang mengalami *stunting* juga berisiko lebih tinggi mengalami penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung koroner, dan stroke.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara faktor-faktor penyebab *stunting*, baik yang langsung maupun tidak langsung, sangat erat dan saling memengaruhi. Kekurangan gizi dan infeksi, sebagai penyebab langsung *stunting*, dipengaruhi oleh faktor tidak langsung seperti ketersediaan pangan, status ekonomi, dan tingkat pendidikan ibu. Ketika status ekonomi dan pendidikan ibu rendah, akses terhadap gizi yang cukup terbatas, memperburuk kondisi *stunting* dan menghambat perkembangan fisik serta kognitif anak. Selain itu, anak yang mengalami *stunting* cenderung lebih rentan terhadap penyakit kronis di masa depan, yang akan memengaruhi kualitas hidup dan produktivitas mereka.

Kerangka Kebijakan Penurunan Stunting Tahun 2024

Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional penurunan *stunting* tahun 2024 difokuskan untuk mencapai target prevalensi sebesar 14 persen, sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020–2024. Upaya ini bertujuan menciptakan SDM yang sehat dan produktif, serta mendukung pencapaian SDGs. Perpres 72/2021 menjadi dasar pelaksanaan kebijakan, dengan lima pilar utama sebagai kerangka kerja. Kelima pilar tersebut adalah komitmen dan kepemimpinan, kampanye edukasi, koordinasi antarsektor, pemenuhan gizi dan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi (Simbolon, 2024, p. 319).

Pilar pertama, komitmen dan visi kepemimpinan, penting untuk mendorong penurunan *stunting*. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya melalui Perpres 72/2021, yang menjadikan *stunting* sebagai prioritas pembangunan di semua tingkatan. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting* 2018–2024 membantu peme-

rintah daerah menyelaraskan kebijakan untuk mencapai target penurunan *stunting* secara efektif.

Pilar kedua, kampanye nasional dan edukasi publik, bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya *stunting* dan pencegahannya. Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) melalui Perpres Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi fokus pada penyuluhan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga balita untuk mendorong perilaku sehat, pola makan bergizi, akses sanitasi, dan pemberian ASI eksklusif.

Pilar ketiga, koordinasi lintas sektor, memastikan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) Percepatan Penurunan *Stunting*. Pendekatan ini mengintegrasikan program kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan infrastruktur agar lebih efisien, tepat sasaran, dan berbasis data.

Pilar keempat, pemenuhan gizi dan ketahanan pangan, fokus pada intervensi seperti pemberian makanan tambahan (PMT) untuk ibu hamil, menyusui, dan balita, serta pemberian suplemen gizi mikro bagi kelompok rentan. Ketahanan pangan didukung melalui akses bahan pangan bergizi, penyediaan air bersih, dan perbaikan sanitasi, terutama di daerah rawan *stunting*.

Pilar terakhir menekankan pemantauan dan evaluasi berbasis hasil. Dengan dukungan teknologi digital, data dikumpulkan secara *real-time* untuk menilai efektivitas program, mengatasi tantangan, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Evaluasi juga memastikan akuntabilitas dan kualitas layanan, sehingga intervensi efektif dalam menurunkan *stunting*.

Kelima pilar ini menjadi kerangka terpadu dalam upaya penanganan *stunting* di Indonesia. Dengan komitmen kuat, koordinasi terintegrasi, dan pemantauan efektif, target penurunan *stunting* diharapkan tercapai. Pendekatan holistik ini juga mendukung SDGs, khususnya peningkatan kualitas hidup anak Indonesia, dengan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan sebagai kunci keberhasilan.

Terkait pendanaan, meskipun penurunan *stunting* menjadi fokus utama dalam APBN 2024, alokasi anggaran spesifik tersebar di berbagai program dan kementerian/lembaga. Anggaran kesehatan 2024 sebesar Rp186,4 triliun (5,6 persen dari APBN) meningkat 8,1 persen dari tahun sebelumnya. Anggaran ini mencakup penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan intervensi di seluruh kabupaten/kota. Pendanaan juga disalurkan melalui Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Dana Desa untuk mendukung pemenuhan gizi dan intervensi di tingkat lokal. Intervensi spesifik dan sensitif dilaksanakan guna menangani penyebab *stunting* secara holistik (Badan Kebijakan Fiskal, 2023).

Penurunan *stunting* adalah prioritas dalam RPJMN 2020–2024, dengan fokus pada 1.000 hari pertama kehidupan. Strategi 8 Aksi Konvergensi digunakan untuk menyelaraskan program pusat dan daerah. Langkah ini mendukung visi RPJPN 2005–2025 untuk menciptakan masyarakat sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia maju pada 2045.

Penurunan *stunting* tidak hanya target jangka pendek, tetapi juga fondasi pembangunan berkelanjutan. Dampaknya mencakup peningkatan pendidikan, produktivitas, dan pengurangan kemiskinan antargenerasi. Dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, kebijakan ini mendukung pencapaian SDGs dan visi Indonesia 2045, di mana *stunting* rendah menjadi indikator kunci SDM yang unggul, sehat, dan kompetitif. Tahun 2024 menjadi pijakan penting bagi agenda pembangunan manusia jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

Memasuki tahun 2025, kebijakan penurunan *stunting* diarahkan untuk mempertahankan capaian dan mempercepat penurunan prevalensi sesuai target jangka menengah. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJMN 2025–2029 menempatkan *stunting* sebagai indikator utama pembangunan manusia dalam kerangka pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah menargetkan prevalensi *stunting* turun menjadi 18,8 persen pada 2025, sebagai bagian dari tahapan menuju 14,4 persen pada 2029 dan 5 persen pada 2045 (Kemensetneg, 2025).

Kebijakan nasional penurunan *stunting* dilanjutkan dengan pelaksanaan program Percepatan, Pencegahan, dan Penurunan *Stunting* (P3S) melalui pendekatan enam pilar. Strategi ini bertujuan memberikan arah kebijakan dan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk periode 2025–2029 (Hadi & Sukardi, 2024, p. 19).

Pendekatan tahun 2025 juga mendorong integrasi layanan gizi ke dalam JKN dan memprioritaskan intervensi pada 1.000 hari pertama kehidupan, sambil memperkuat peran kader dan tenaga kesehatan hingga tingkat desa. Dengan arah kebijakan yang makin terstruktur dan berbasis bukti, tahun 2025 menjadi titik awal penting untuk transisi menuju pembangunan manusia yang lebih berkualitas dan berdaya saing.

Peran Pemangku Kepentingan

Untuk mencapai target 14 persen pada akhir 2024, kolaborasi dalam pelaksanaan RAN Penurunan *Stunting* sangat penting. Berbagai kementerian/lembaga seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kemenkes, dan Kementerian Desa, serta instansi lainnya berperan aktif. Kerja sama di tingkat pusat harus didukung oleh koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah dan desa, sesuai dengan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi (BKKBN, 2021b, pp. 23–24).

Koordinasi juga melibatkan sektor non-pemerintah, seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi profesi, kelompok keagamaan, mitra pembangunan, media massa, dan masyarakat sipil. Tim pendamping keluarga berperan sejak perencanaan hingga evaluasi pendampingan bagi keluarga berisiko *stunting*. Pemerintah mengadopsi pendekatan lintas sektor yang terintegrasi, mencakup kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan ketahanan pangan. Dengan intervensi holistik yang mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan, strategi 8 Aksi Konvergensi memastikan program berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran (Nazaruddin et al., 2023, p. 67).

Implementasi 8 Aksi Konvergensi dimulai dengan analisis situasi yang komprehensif, mencakup pemetaan prevalensi *stunting*, cakupan layanan, dan identifikasi kelompok sasaran prioritas. Analisis ini penting untuk memahami permasalahan yang dihadapi di tingkat kabupaten/kota hingga desa, sehingga program yang dirancang dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Berdasarkan hasil analisis, rencana kegiatan intervensi disusun secara terintegrasi, dengan melibatkan berbagai sektor. Proses ini memastikan bahwa program dan anggaran dari pemerintah pusat hingga daerah dikelola secara harmonis, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau pemborosan sumber daya.

Langkah selanjutnya adalah rembuk *stunting*, yaitu forum musyawarah di tingkat daerah untuk menyepakati rencana kegiatan, pembagian sumber daya, dan tanggung jawab antarpemangku kepentingan. Forum ini melibatkan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, sehingga tercipta kolaborasi yang inklusif. Peraturan bupati atau walikota tentang peran desa juga menjadi bagian penting dari

strategi ini. Regulasi ini bertujuan untuk memperkuat peran desa dalam pelaksanaan program pencegahan *stunting*, termasuk dalam pengelolaan Dana Desa untuk mendukung intervensi gizi.

Dalam pelaksanaannya, pembinaan kader pembangunan manusia (KPM) di tingkat desa menjadi elemen kunci. Kader-kader ini dilatih untuk memonitor status gizi, kesehatan ibu dan anak, serta memastikan akses layanan dasar bagi masyarakat. Mereka juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola makan bergizi, kebersihan lingkungan, dan perawatan kesehatan anak. Seluruh kegiatan ini didukung oleh sistem manajemen data yang terintegrasi, yang memungkinkan pemerintah untuk memantau perkembangan pelaksanaan program secara *real-time*. Data ini digunakan untuk mengevaluasi dampak program, mengidentifikasi kendala, dan menyusun kebijakan yang lebih efektif.

Pengukuran dan publikasi data prevalensi *stunting* dilakukan secara rutin untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Data ini juga berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah dalam mengevaluasi program dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Untuk mendorong komitmen daerah, pemerintah menerapkan mekanisme penghargaan dan sanksi. Daerah dengan kinerja baik diberikan insentif, sementara daerah yang gagal mencapai target diberi sanksi untuk meningkatkan akuntabilitas mereka.

Pendekatan lintas sektor ini memastikan bahwa upaya penurunan *stunting* berjalan secara terkoordinasi, berbasis bukti, dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan intervensi dari berbagai sektor, pemerintah berharap dapat menciptakan dampak yang signifikan dalam menurunkan prevalensi *stunting*, sekaligus memperbaiki kualitas hidup anak-anak Indonesia di masa depan.

Program dan Intervensi

Stunting pada balita umumnya disebabkan oleh kurangnya gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pengasuhan yang tidak optimal, dan terbatasnya akses air bersih, sanitasi, serta layanan kesehatan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah meluncurkan program perbaikan gizi global *Scaling Up Nutrition* (SUN). Program ini diimplementasikan di Indonesia melalui Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi untuk 1.000 HPK. Untuk mengatasi *stunting*, dilakukan dua jenis intervensi, yaitu spesifik dan sensitif (Sugianto, 2024, pp. 70–71). Kedua pendekatan ini saling melengkapi, bertujuan untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, serta lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal mereka. Mengingat tingginya prevalensi *stunting* di Indonesia, pendekatan ini menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional, termasuk dalam RPJMN 2020–2024.

Intervensi gizi spesifik bertujuan langsung meningkatkan gizi ibu hamil, bayi, dan balita. Salah satunya adalah PMT untuk ibu hamil yang kekurangan energi dan balita dengan gizi buruk. PMT membantu memenuhi kebutuhan gizi mereka dan mencegah dampak serius kekurangan gizi, seperti *stunting*. Program ini sangat penting di daerah dengan kerentanan tinggi terhadap masalah gizi.

Selain PMT, promosi dan dukungan untuk pemberian ASI eksklusif juga menjadi prioritas dalam intervensi gizi spesifik. ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan optimal, sekaligus melindungi bayi dari risiko infeksi dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dukungan ini sering kali berupa edukasi bagi para ibu mengenai manfaat ASI, serta penyediaan fasilitas ramah ibu menyusui di tempat kerja dan ruang publik.

Suplemen gizi diberikan sebagai bagian dari intervensi untuk mencegah anemia pada ibu hamil dan balita, serta meningkatkan imunitas dan kesehatan mata anak-anak dengan suplemen vitamin A. Distribusi suplemen ini dilakukan melalui pos pelayanan terpadu (posyandu) dan fasilitas kesehatan lainnya, menjangkau masyarakat hingga daerah terpencil. Selain itu, pemberian obat cacing secara berkala juga penting untuk mencegah gangguan penyerapan nutrisi pada anak, terutama di daerah dengan sanitasi buruk. Dengan obat cacing, anak-anak dapat menyerap nutrisi lebih baik, mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Deteksi dini dan penanganan gizi buruk penting dalam intervensi gizi. Program ini meliputi skrining rutin untuk mengevaluasi status gizi anak-anak, sehingga yang membutuhkan perhatian khusus dapat segera ditangani. Pada kasus gizi buruk, perawatan gizi terapeutik diberikan, baik rawat jalan maupun rawat inap, untuk memulihkan status gizi dan kesehatan anak-anak. Dengan berbagai program ini, intervensi gizi spesifik diharapkan dapat mengurangi *stunting* di Indonesia. Pendekatan yang menargetkan langsung masalah gizi ini merupakan langkah penting untuk menciptakan generasi sehat dan berkualitas di masa depan.

Intervensi gizi sensitif penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perbaikan gizi anak dan keluarga. Pendekatan ini fokus pada faktor-faktor tidak langsung seperti sanitasi, pendidikan, dan ketahanan pangan. Salah satu kuncinya adalah memastikan akses air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai untuk mencegah penyakit yang mengganggu penyerapan nutrisi. Dengan lingkungan yang bersih, anak-anak memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Upaya mengatasi *stunting* memerlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sosial. Edukasi gizi dan kebersihan, serta akses ke layanan kesehatan dasar seperti imunisasi dan pemeriksaan kehamilan, penting untuk mencegah *stunting*. Ketahanan pangan melalui peningkatan produksi lokal dan distribusi pangan bergizi juga menjadi faktor kunci. Selain itu, infrastruktur yang memadai, seperti akses air bersih dan sanitasi, sangat penting untuk mendukung pertumbuhan optimal anak.

Sektor pendidikan berperan penting dalam menyebarkan informasi gizi melalui sekolah, sedangkan sektor sosial memberikan bantuan langsung untuk keluarga yang membutuhkan. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil, serta sektor swasta untuk memastikan keberhasilan program. Implementasi intervensi yang terkoordinasi diharapkan dapat menurunkan prevalensi *stunting* dan mendukung pencapaian SDGs, khususnya SDG 2 dan SDG 3. Keberhasilan ini akan meningkatkan kualitas SDM Indonesia, memperbaiki kesehatan, dan daya saing bangsa di masa depan.

Evaluasi Kebijakan dan Strategi di Tahun 2024

Capaian Kebijakan

Capaian kebijakan penurunan *stunting* di Indonesia selama tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi *stunting* secara nasional terus mengalami penurunan, dari 27,7 persen pada 2019 menjadi 24,4 persen pada 2021, 21,6 persen pada 2022, dan 21,5 persen pada 2023 (BRIN, 2023; Kemenkes, 2023). Laporan Kinerja Penurunan *Stunting* Bappenas (2024) mencatat bahwa angka prevalensi turun lebih lanjut menjadi 19,8 persen pada 2024, menunjukkan kemajuan yang cukup berarti menuju target nasional sebesar 14 persen pada akhir RPJMN 2020–2024.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung. Komitmen dan kepemimpinan kepala daerah yang kuat terbukti mampu mendorong pelaksanaan program secara lebih terarah dan terintegrasi. Provinsi Bali tercatat sebagai provinsi terbaik dalam penurunan *stunting*. Berbagai program seperti PMT, suplementasi gizi mikro, promosi ASI eksklusif, serta edukasi pola makan bergizi dijalankan secara masif, terutama bagi kelompok rentan (Machmudi, 2025).

Pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung program intervensi spesifik dan sensitif, seperti perbaikan sanitasi dan penyediaan air bersih, juga memberikan dampak positif terhadap pencegahan *stunting*. Akses terhadap layanan dasar yang lebih baik memungkinkan upaya pencegahan penyakit infeksi berjalan optimal, mengingat infeksi-seperti diare-masih menjadi penyebab langsung terjadinya *stunting*. Di sisi lain, keterlibatan aktif masyarakat melalui kader posyandu dan tokoh lokal makin memperkuat penyebaran informasi, perubahan perilaku, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin.

Penerapan pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial (HITS) sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 72/2021, turut memperkuat koordinasi lintas sektor dan mendorong penyesuaian program berdasarkan karakteristik wilayah. Daerah yang memanfaatkan data secara tepat dalam merancang intervensi terbukti lebih cepat mencapai penurunan prevalensi *stunting*. Faktor sosial ekonomi dan tingkat pendidikan ibu juga masih menjadi determinan penting dalam praktik pemberian makan dan pengasuhan anak yang optimal.

Secara keseluruhan, pencapaian tahun 2024 menjadi bukti bahwa pendekatan berbasis bukti, kolaboratif, dan terfokus mampu memberikan hasil. Namun, tantangan masih perlu dihadapi, seperti ketimpangan antarwilayah, keterbatasan tenaga terlatih di daerah, serta kebutuhan akan pendanaan yang berkelanjutan. Untuk mempercepat pencapaian target prevalensi 18,8 persen pada tahun 2025, dibutuhkan penguatan peran lintas sektor, peningkatan kualitas layanan di daerah, serta optimalisasi data dalam pengambilan keputusan kebijakan gizi yang lebih adaptif dan responsif.

Tantangan yang Dihadapi

Meskipun capaian penurunan *stunting* nasional menunjukkan kemajuan yang signifikan, dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen pada 2024 (Bappenas, 2024), berbagai tantangan masih membayangi implementasi kebijakan secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah terkait pendanaan dan pengelolaan anggaran. Meskipun anggaran kesehatan meningkat menjadi 5,6 persen dari total APBN tahun 2024, alokasi dana untuk program penurunan *stunting* tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan belum seluruhnya dikelola secara terintegrasi. Hal ini menyulitkan proses pemantauan dan evaluasi, serta berpotensi menyebabkan tumpang tindih kegiatan di tingkat pusat maupun daerah.

Kendala berikutnya terletak pada aspek SDM dan infrastruktur layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Keterbatasan tenaga kesehatan terlatih, minimnya fasilitas pelayanan gizi, serta distribusi logistik yang belum merata menyebabkan intervensi tidak selalu menjangkau kelompok yang paling rentan. Ini berdampak pada rendahnya cakupan program, seperti pemberian makanan tambahan dan pemantauan pertumbuhan anak secara rutin.

Dari sisi pelaksanaan, koordinasi lintas sektor dan antarwilayah juga menjadi hambatan besar. Implementasi program penurunan *stunting* memerlukan kolaborasi antara sektor kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, hingga infrastruktur dasar, seperti air bersih dan sanitasi. Namun, disparitas kapasitas antardaerah serta lemah-

nya sinergi kebijakan masih menghambat integrasi program, meskipun pendekatan HITS telah diterapkan secara nasional.

Selain itu, upaya perubahan perilaku masyarakat belum sepenuhnya berhasil. Banyak keluarga, terutama di daerah dengan prevalensi tinggi, masih belum memahami pentingnya gizi seimbang, pemberian ASI eksklusif, serta praktik kebersihan yang memadai. Tantangan edukasi ini makin kompleks ketika dipadukan dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya lokal yang memengaruhi pola konsumsi dan pengasuhan anak.

Keterlibatan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil juga masih terbatas. Padahal, peran mereka sangat penting dalam memperluas cakupan intervensi, menyediakan dukungan logistik, dan memperkuat kampanye edukasi. Tanpa kolaborasi yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, upaya penurunan *stunting* tidak akan optimal. Oleh karena itu, untuk mempercepat pencapaian target penurunan *stunting* pada tahun-tahun berikutnya, dibutuhkan strategi yang lebih adaptif, penguatan tata kelola lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM daerah, serta keterlibatan multipihak secara lebih aktif dan berkelanjutan.

Pelajaran yang Dapat Dipetik dan Praktik Terbaik

Pelaksanaan kebijakan penurunan *stunting* sepanjang tahun 2024 memberikan sejumlah pelajaran penting, baik dari sisi keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi. Salah satu keberhasilan yang menonjol adalah peran strategis edukasi gizi, pemberian ASI eksklusif, dan pemanfaatan pangan lokal dalam mencegah *stunting*, khususnya selama periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Namun, efektivitas edukasi belum merata karena masih banyak keluarga di wilayah terpencil yang kurang memahami pentingnya pola makan bergizi. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan intensitas dan cakupan edukasi gizi berbasis komunitas di tahun 2025.

Keberhasilan penurunan *stunting* juga ditopang oleh penerapan pendekatan holistik dan integratif melalui sinergi lintas sektor. Pendekatan HITS terbukti efektif dalam mendukung intervensi yang tepat sasaran. Provinsi Bali menjadi contoh terbaik secara nasional dalam menurunkan angka *stunting* secara signifikan. Keberhasilan ini didorong oleh pemanfaatan digitalisasi data keluarga berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan program dilakukan secara lebih akurat dan terintegrasi. Hal ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola serta akurasi dan integrasi data merupakan faktor kunci dalam efektivitas program penurunan *stunting*.

Namun, implementasi HITS belum berjalan optimal di semua wilayah. Ketimpangan kapasitas SDM, infrastruktur digital, dan koordinasi di tingkat daerah masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, tahun 2025 perlu difokuskan pada penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan data dan pemanfaatan teknologi untuk pemantauan intervensi secara *real-time*.

Pelibatan aktif masyarakat juga menjadi praktik terbaik yang terbukti berhasil. Peran kader posyandu, pendamping keluarga, dan tokoh lokal mempercepat perubahan perilaku di tingkat rumah tangga. Di sisi lain, dukungan dari sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil masih terbatas, sehingga perlu diperkuat untuk mendukung program pangan bergizi dan layanan berbasis komunitas.

Belajar dari praktik global, WHO dan Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menekankan pentingnya kebijakan berbasis bukti, pemantauan berkelanjutan, serta koordinasi multisektor yang solid. Sementara Jepang berhasil mengintegrasikan

sistem gizi dan kesehatan dengan teknologi dan pemantauan ketat. Indonesia dapat mengambil inspirasi dari pendekatan ini dengan tetap menyesuaikan karakteristik lokal, terutama untuk menjangkau kelompok rentan dan wilayah tertinggal.

Sebagai bekal menghadapi tahun 2025, pelajaran dari tahun sebelumnya menegaskan pentingnya penguatan edukasi berbasis komunitas, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader, digitalisasi sistem pemantauan, serta sinergi program antarsektor. Dengan menerapkan praktik-praktik terbaik ini secara lebih luas dan adil, Indonesia berpeluang besar mencapai target prevalensi *stunting* 18,8 persen pada 2025 dan memperkuat fondasi menuju generasi emas 2045.

Rekomendasi

Berdasarkan evaluasi capaian dan tantangan penurunan *stunting* tahun 2024, sejumlah rekomendasi strategis perlu diprioritaskan untuk mempercepat pencapaian target prevalensi 18,8 persen pada 2025 dan mewujudkan fondasi menuju generasi emas 2045.

Pertama, kampanye edukasi gizi dan pengasuhan berbasis komunitas perlu diperluas dan ditingkatkan kualitasnya. Edukasi harus disampaikan melalui pendekatan yang kontekstual dan komunikatif, memanfaatkan media lokal, kader posyandu, dan tokoh masyarakat, serta memadukan kearifan lokal. Penggunaan teknologi digital, seperti aplikasi kesehatan dan *dashboard* pemantauan gizi, dapat membantu menjangkau masyarakat secara lebih luas, terutama di wilayah terpencil.

Kedua, penguatan kebijakan berbasis data dan konvergensi lintas sektor harus diperkuat di semua tingkat pemerintahan. Pemerintah pusat bersama daerah perlu memastikan kualitas dan konsistensi data *by name by address* sebagai dasar untuk perencanaan dan intervensi. Digitalisasi data keluarga dan pemanfaatan SPBE, seperti yang berhasil diterapkan di Bali, dapat direplikasi di daerah lain yang memiliki tantangan serupa.

Ketiga, alokasi anggaran yang memadai dan terarah sangat penting. Pemerintah perlu meninjau ulang skema pendanaan untuk memastikan intervensi sensitif dan spesifik tersalurkan secara efektif ke daerah prioritas. Pemanfaatan Dana Desa, BPNT, dan program JKN harus dikawal dengan mekanisme akuntabilitas dan pelaporan yang transparan, disertai penguatan peran legislatif dalam pengawasan.

Keempat, penguatan layanan kesehatan dasar harus menjadi prioritas di daerah tertinggal. Ini mencakup penyediaan infrastruktur kesehatan, pemenuhan tenaga gizi dan tenaga kesehatan yang kompeten, serta pelatihan berkelanjutan di pusat kesehatan masyarakat dan posyandu. Dukungan logistik untuk pelaksanaan pemantauan tumbuh kembang dan pemberian intervensi gizi perlu dipastikan berjalan optimal.

Kelima, kolaborasi multipihak dan pemberdayaan masyarakat harus diperluas melalui kemitraan yang strategis. Sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi dapat terlibat dalam mendukung pengembangan program pangan lokal bergizi, inovasi intervensi berbasis komunitas, serta pelatihan kader. Kolaborasi ini penting untuk memperluas cakupan, meningkatkan efektivitas program, dan memastikan keberlanjutan.

Terakhir, sistem monitoring dan evaluasi yang adaptif dan berbasis hasil perlu diperkuat. Evaluasi tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga mencerminkan pencapaian nyata di lapangan melalui indikator dampak dan perilaku. Ini akan memungkinkan penyesuaian kebijakan secara tepat waktu serta memperkuat akuntabilitas program secara nasional dan daerah.

Selain menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut secara konsisten, Komisi IX DPR RI perlu mendorong pengalokasian anggaran yang lebih tepat sasaran serta memastikan program intervensi gizi menjangkau daerah prioritas. Pengawasan terhadap pelaksanaan program harus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, penting bagi Komisi IX untuk mendorong kebijakan berbasis data, memperkuat peran kader kesehatan, serta menyempurnakan regulasi guna mendukung sinergi lintas sektor.

Kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat sipil juga perlu difasilitasi agar cakupan program pangan bergizi dan edukasi publik makin luas. Di daerah pemilihan, anggota Komisi IX dapat berkontribusi secara langsung melalui kegiatan penyuluhan gizi dan edukasi perilaku sehat yang sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal. Dengan memperkuat fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, Komisi IX memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka *stunting* dan membangun generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.

Penutup

Kebijakan penurunan *stunting* pada tahun 2024 menunjukkan efektivitas melalui turunnya prevalensi menjadi 19,8 persen secara nasional. Capaian ini mencerminkan keberhasilan berbagai program seperti pemberian makanan tambahan, dukungan ASI eksklusif, serta pendekatan HITS yang memperkuat koordinasi lintas sektor. Meski demikian, tantangan seperti ketimpangan pelaksanaan antardaerah, kurangnya tenaga kesehatan, dan kelemahan dalam sistem data dan pemantauan masih menghambat pencapaian yang lebih optimal.

Faktor kunci yang memengaruhi pencapaian, antara lain, adalah kualitas data, efektivitas koordinasi antarlembaga, serta kapasitas implementasi di tingkat lokal. Untuk mempercepat penurunan *stunting*, perlu penguatan mekanisme pemantauan yang lebih responsif dan berbasis bukti, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, serta integrasi intervensi di wilayah dengan prevalensi tinggi.

Komisi IX DPR RI berperan strategis dalam mendorong anggaran yang lebih proporsional, mengawasi efektivitas distribusi program, serta menggalang dukungan lintas sektor melalui fungsi legislasi dan pengawasan. Upaya ini akan memperkuat implementasi kebijakan secara menyeluruh, mempercepat penurunan *stunting* pada 2025, dan memperkuat fondasi pembangunan manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Daftar Pustaka

- Astari, D. W., Sari, D. K., Hakim, D. R., Apriliani, F., Mufarikhah, M., Hasanah, P. U., Septiani, S. A., & Hasyim, H. (2023). Disparitas *stunting* di wilayah pedesaan dan perkotaan: Systematic review. *Health Information : Jurnal Penelitian*, 15(3), 1–15.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2023, Agustus 16). Fokus utama APBN 2024: Penurunan kemiskinan, *stunting*, dan kesenjangan. Kementerian Keuangan. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2023/08/16/4442-fokus-utama-apbn-2024-penurunan-kemiskinan-stunting-dan-kesenjangan>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Bappenas]. (2024). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025–2029*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional [BKKBN]. (2021a, Februari 24). *Indonesia cegah stunting, antisipasi generasi stunting guna mencapai Indonesia emas 2045*. Kementerian

Komunikasi dan Digital. <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel-gpr/detail/indonesia-cegah-stunting-antisipasi-generasi-stunting-guna-mencapai-indonesia-emas-2045>

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional [BKKBN]. (2021b). *Kebijakan dan strategi percepatan penurunan stunting di Indonesia* [Modul 1 Training of Trainer (ToT) Pendampingan Keluarga dalam Percepatan Penurunan Stunting bagi Fasilitator Tingkat Provinsi]. https://lms-elearning.bkkbn.go.id/pluginfile.php/18037/mod_resource/content/1/4.%20Buku%20Kebijakan%20Dan%20Strategi%20Percepatan%20Penurunan%20Stunting%20Di%20Indonesia.pdf
- Badan Riset dan Inovasi Nasional [BRIN]. (2023, November 30). BRIN ungkap prevalensi stunting di Indonesia cenderung fluktuatif. <https://brin.go.id/news/116962/brin-ungkap-prevalensi-stunting-di-indonesia-cenderung-fluktuatif>
- Fitri J., R., Huljannah, N., & Rochmah, T. N. (2022). Stunting prevention program in Indonesia: A systematic review. *Media Gizi Indonesia*, 17(3), 281-292. <https://doi.org/10.20473/mgi.v17i3>
- Hadi, S., & Sukardi, T. T. (2024, November). Strategi nasional percepatan pencegahan dan penurunan stunting 2025-2029. Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. https://drive.google.com/file/d/1id_X_uzLQ43iYR820Y_CDUzBNA0PIraV/view
- Kementerian Kesehatan [Kemenkes]. (2023, Januari 25). Prevalensi stunting di Indonesia turun ke 21,6% dari 24,4%. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/>
- Kementerian Kesehatan [Kemenkes]. (2024, Juli 25). Peringatan HAN 2024 jadi momentum lindungi anak dari stunting dan polio. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20240723/4346087/peringatan-han-2024-jadi-momentum-lindungi-anak-dari-stunting-dan-polio/>
- Kementerian Sekretariat Negara [Kemensetneg]. (2024, September 4). Buka rakornas stunting, Wapres ungkap keberhasilan pemerintah turunkan prevalensi lima tahun terakhir. https://www.setneg.go.id/baca/index/buka_rakornas_stunting_wapres_ungkap_keberhasilan_pemerintah_turunkan_prevalensi_lima_tahun_terakhir
- Kementerian Sekretariat Negara [Kemensetneg]. (2025, Mei 28). Prevalensi stunting Indonesia turun ke 19,8%. Tim Percepatan Penurunan Stunting. <https://stunting.go.id/prevalensi-stunting-indonesia-turun-ke-198/>
- Lestari, P. A., Yuniarti, L. N. L., Sudiarta, I. K., Lestari, M. P. L., & Agustina, K. S. (2024). Pencegahan stunting melalui edukasi pada masyarakat di Desa Cepaka Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Bali. *Jurnal Sinergi Kesehatan Indonesia*, 2(1), 1-9. <https://doi.org/10.55887/jski.v2i1.18>
- Machmudi, I. (2025, Juni 5). Bali jadi provinsi terbaik penurunan stunting. *Media Indonesia*. https://mediaindonesia.com/humaniora/779680/bali-jadi-provinsi-terbaik-penurunan-stunting#goog_rewarded
- Najmah., Idris, H., Utama, F., Sari, I. P., Rosyada, A., Anjani, R., Popita, M. D., Arinda, D. T., Yeni., Ermi, N., Andarini, D., Etrawati, F., & Ardillah, Y. (2022). *Ilmu kesehatan masyarakat: Interseksi teori & aplikasi pada konteks Indonesia*. CV. Bintang Semesta Media.
- Nazaruddin, B., Rahmadani, S., Sulianderi, N. M. V., Abadi, M. Y., Anwar, A., Rosmanely., Trisasmita, L., Hamka, N. A., Arfandi., M. A., & Amriani, A. (2023). *Pengembangan pengukuran konvergensi program percepatan penurunan stunting*. Deepublish.
- Neherta, M., Marlani, R., & Deswita. (2023). *Faktor-faktor penyebab stunting pada anak*. CV. Adanu Abimata.
- Prawirohartono, E. P. (2021). *Stunting: Dari teori dan bukti ke implementasi di lapangan*. UGM Press.
- Putri, N. M., Nasaruddin, H., Pramono, S. D., Darussalam, A. H. E., & Syamsu, R. F. (2024). Hubungan pola asuh ibu dengan kejadian stunting pada anak balita di puskesmas Madello Kab. Barru.

Fakumi Medical Journal: Jurnal Mahasiswa Kedokteran, 4(1), 83-93. <https://doi.org/10.33096/fmj.v4i1.405>

Rahman, H., Rahmah, M., & Saribulan, N. (2023). Upaya penanganan *stunting* di Indonesia, analisis bibliometrik dan analisis konten. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 8(1), 44–59.

Simbolon, D. (2024). *Kebijakan percepatan penurunan prevalensi stunting*. CV. Sarnu Untung.

Sugianto, M. A. (2024). *Keberhasilan kebijakan percepatan penurunan stunting*. Wawasan Ilmu.

Supermana, R. (2023, Desember 23). Indonesia kejar posisi angka prevalensi *stunting* internasional. RRI.co.id. <https://www.rri.co.id/kesehatan/490856/indonesia-kejar-posisi-angka-prevalensi-stunting-internasional>

United Nations Internasional Children's Emergency Fund [Unicef]. (2023, July 12). *Child malnutirion*. <https://data.unicef.org/topic/nutrition/malnutrition/>

World Health Organization [WHO]. (2015, November 19). *Stunting secara singkat*. https://www-who-int.translate.goog/news/item/19-11-2015-stunting-in-a-nutshell?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc